

## UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN (*RENT A CAR*)

Oleh: A. A. Pradnyaswari, S.H.,M.H.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Denpasar

### **Abstract**

*The development of the vehicle leasing business today is increasing, where one of the causes for the increasing demand for car rental traveler . With the growing vehicle leasing business, then often there is a problem, especially among those who rent vehicles by the tenant in terms of the trust given by the lessor to the lessee, where trust is often abused by the tenant in leasing the vehicle so that rent often feel aggrieved by the tenant, such as tenants do not meet the performance at all, tenants meet achievement but not on time or tenants but do not meet the appropriate performance or mistaken when vehicle is already in use for some time. In this case the tenant can be said to have been in default to the lessor. In this regard it will be discussed on how the responsibilities of tenants when in default and how to remedy breach of contract completion.*

**Keyword :** *lease agreement, breach of contract, liability*

### **Abstrak**

Perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan bermotor atau *Rent A Car* saat ini semakin meningkat, dimana salah satu faktor penyebabnya karena meningkatnya permintaan sewa mobil dari wisatawan. Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa (*Rent A Car*), maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa dalam menyewakan kendaraan *rent a car* sehingga yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa seperti misalnya penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru padahal kendaraan bermotor dimaksud sudah dipakai untuk beberapa waktu. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab penyewa bila melakukan wanprestasi dan bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi.

**Kata Kunci :** Perjanjian sewa menyewa, wanprestasi, tanggung jawab

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan ramai dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik, salah satu daerah yang sangat diminati oleh wisatawan adalah Bali.

Meningkatnya arus kunjungan wisatawan ke Bali, menyebabkan daerah ini mengalami perkembangan pesat dalam bidang pembangunan khususnya dari sektor ekonomi, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata. Masyarakat

yang tinggal di daerah-daerah yang terdapat obyek wisata tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan ekonominya dengan cara mendirikan rumah makan, atau toko-toko tempat menjual cindramata serta pakaian-pakaian dan sebagainya yang menjadi kebutuhan para wisatawan, dan salah satu usaha yang berkembang pesat belakangan ini adalah usaha sewa menyewa sarana transportasi atau yang lebih dikenal dengan *Rent A Car*.

Perkembangan bisnis sewa menyewa kendaraan bermotor atau *Rent A Car* ini memang merupakan tuntutan dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Para wisatawan membutuhkan jenis angkutan yang bisa disetir menurut kemauan sendiri dan tidak perlu berdesakan dengan wisatawan lainnya. Dalam hal sewa menyewa kendaraan atau usaha *rent a car*, itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan

perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing. Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa *Rent A Car*, maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa terutama dalam hal kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa dalam menyewakan kendaraan *rent a car* sehingga yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa seperti misalnya penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru padahal kendaraan bermotor dimaksud sudah dipakai untuk beberapa waktu. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan.

Berdasarkan pada latar belakang diatas sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam dalam suatu tulisan ilmiah yang berjudul “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (*Rent A Car*)”. Adapun permasalahan dalam tulisan ini meliputi bentuk

tanggung jawab penyewa terhadap perusahaan sewa menyewa kendaraan bermotor (*rent a car*) dalam hal terjadinya wanprestasi serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor (*rent a car*).

## PEMBAHASAN

Pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah “Sesuatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut KUHPerdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah memenuhi empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya .
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Pada saat perjanjian itu sah maka perikatan itu mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata : Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata : Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan

kesepakatan para pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang.

Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghormati janji-janji (kewajiban) berarti ada pihak yang kepentingannya dilanggar maka hukum memberikan perlindungan atas kepentingan para pihak yang dilanggar janjinya tersebut. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum perjanjian adalah kepentingan ekonomi. Tanggung jawab ini lahir dari adanya pelanggaran terhadap sebuah perjanjian. Janji-janji dalam konsep hukum perikatan adalah prestasi. Rumusan prestasi dalam hukum perikatan Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, yaitu berupa :

- a. memberikan sesuatu
- b. berbuat sesuatu
- c. tidak berbuat sesuatu

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu *Huur onver huur*, menurut bahasa sehari-hari sewa artinya pemakaian sesuatu dengan membayar uang.<sup>1</sup> Pengertian dari perjanjian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusumo, 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 102.

suatu harga, yang oleh pihak terakhir itu disanggupi pembayarannya.

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara, serta tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa tersebut, yaitu :<sup>2</sup>

1. Unsur *essensialia*
2. Unsur *naturalia*
3. Unsur *aksidentalialia*.

Setelah syarat-syarat telah dipenuhi oleh kedua belah pihak maka perjanjian sewa menyewa dapat dilaksanakan. Perjanjian sewa menyewa seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya yaitu perjanjian yang bersifat konsensual. Artinya, perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut ada dua unsur pokok yaitu mengenai barang dan harga sewa. Sehingga para pihak mengikatkan diri untuk memenuhi suatu prestasi yang menyebabkan timbulnya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memberikan atau melakukan sesuatu.

Dalam hal sewa menyewa kendaraan *rent a car* itu diperlukan adanya suatu perjanjian sewa menyewa terlebih dahulu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tersebut dibuat tanpa adanya suatu paksaan dari pihak lain, tetapi secara sukarela oleh para pihak. Pembuatan perjanjian sewa-menyewa kendaraan bermotor ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

Menurut R. Subekti sewa menyewa adalah perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>3</sup>

Sesuai dengan yang dikemukakan R. Subekti, bahwa pihak penyewa memiliki dua kewajiban pokok, yaitu :

1. Membayar uang sewa pada waktunya.

---

<sup>2</sup> Suryodiningrat, 1985, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung, h. 39

---

<sup>3</sup>R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti I), h. 164.

2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya seolah-olah barang miliknya sendiri.

R. Subekti juga mengemukakan pendapatnya mengenai kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Menyerahkan barang yang disewakan itu kepada penyewa.
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
3. Memberikan pihak penyewa kenikmatan yang tenteram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Kewajiban yang lain bagi pihak yang menyewakan yaitu melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang memang menjadi kewajiban pihak penyewa selama waktu sewa.

Sewa menyewa seperti halnya jual-beli, adalah suatu perjanjian yang sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, baik jual beli maupun sewa menyewa adalah merupakan suatu upaya yang lazim dipergunakan oleh para warga masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingannya.<sup>5</sup> Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa menyewa barang

adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>6</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

Dalam uraian pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas disebutkan tentang “waktu tertentu”. Yang dimaksud dengan waktu tertentu tersebut adalah bahwa waktu sewa pada perjanjian sewa menyewa sebenarnya tidak perlu disebutkan untuk beberapa lama barang itu disewa, asal sudah disetujui berapa harga sewanya untuk satu jam, satu hari, satu bulan, satu tahun (misalnya untuk perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor). Peraturan tentang sewa menyewa yang termuat

<sup>4</sup> R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti II), h. 91.

<sup>5</sup> Noemin S., 1998, *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta, h. 29.

<sup>6</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1981, *hukum perdata tentang persetujuan persetujuan tertentu*, Alumni, Bandung, h. 190.

dalam bab VII dari Buku ketiga KUHPerdara, dalam bab VII ini terdiri dari pasal 1547 sampai dengan pasal 1600 yang memuat ketentuan tentang sewa menyewa, berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena waktu tertentu bukanlah syarat mutlak untuk perjanjian sewa menyewa. Tentang harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli tetapi menjadi tukar menukar, tetapi dalam sewa menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.<sup>7</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan hanya menyerahkan pemakaian dan memungutan hasil dari barang sewaan kepada penyewa sedangkan hak pemilik tetap berada pada tangan yang menyerahkan. Objek perjanjian sewa menyewa adalah barang dan harga. Untuk barang bisa bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor terdapat dua bentuk

perjanjian yang dibuat, yaitu perjanjian sewa lisan dan perjanjian sewa tertulis.

a. Perjanjian Sewa Lisan

Perjanjian sewa lisan yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara lisan tanpa membuat perjanjian tertulis, cukup dengan kesepakatan kata dari para pihak. Hal ini dilakukan bila sudah ada kepercayaan yang benar-benar dari yang perusahaan *rent a car* kepada penyewa. Biasanya penyewa adalah pelanggan yang sudah sangat dipercaya atau kolega dekat dari pimpinan perusahaan mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dipikul jika terjadi sesuatu pada objek sewa menyewa. Mengenai perjanjian lisan dalam sewa menyewa ini juga diakui dan diatur dalam pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perjanjian Sewa Tertulis

Perjanjian sewa tertulis yaitu perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis. Didalamnya memuat ketentuan atau syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Mengenai perjanjian sewa menyewa secara tertulis ini diatur dalam ketentuan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 41.

pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat tertulis ini juga merupakan alat bukti yang lebih kuat dari pada perjanjian secara lisan.

Dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor dikenal dua jenis perjanjian sewa menyewa, yaitu perjanjian sewa “lepas kunci” dan perjanjian sewa “dengan sopir”.

a. Perjanjian sewa “lepas kunci”

Perjanjian sewa “lepas kunci” yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dimana terjadi setelah ada kesepakatan sehingga timbul perjanjian sewa menyewa, kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan sepenuhnya kepada penyewa untuk dinikmati kegunaannya. Secara garis besar dalam perjanjian sewa “lepas kunci” ini mengandung arti bahwa setelah kendaraan diserahkan kepada penyewa maka penyewa bertanggung jawab penuh atas kendaraan tersebut sampai berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau kendaraan diserahkan kepada yang menyewakan. Penyewa harus bertanggung jawab atas segala kerugian pada kendaraan yang

disewanya misalnya jika mengalami kecelakaan, kerusakan, dan lain sebagainya seperti tanggung jawab yang harus dipikul dalam sewa menyewa sesuai ketentuan pasal 1564 KUHPerdata, termasuk diantaranya dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor di Denpasar ini jika timbul resiko yaitu bila terjadi *overmacht* atau keadaan memaksa yang menimpa kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa. Untuk perjanjian sewa “lepas kunci” ini biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis mengingat adanya tuntutan tanggung jawab yang besar dari pihak penyewa bila terjadi kerugian terhadap objek sewa.

b. Perjanjian sewa “dengan sopir”

Perjanjian sewa “dengan sopir” yaitu perjanjian sewa menyewa kendaraan, dimana terjadi setelah ada kesepakatan sehingga timbul perjanjian sewa menyewa. Kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa diserahkan kepada penyewa untuk dinikmati sesuai kegunaannya dan tujuannya namun disertai dengan adanya sopir dari pihak yang menyewakan. Secara garis besar,

perjanjian sewa “dengan sopir” mempunyai pengertian bahwa setelah terjadi perjanjian dan kendaraan diserahkan kepada penyewa beserta adanya sopir maka yang bertanggung jawab atas kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa adalah pihak pengusaha *rent a car*. Bila terjadi kecelakaan, kerusakan dan sebagainya atas kendaraan sewa termasuk resiko akibat adanya *overmacht* pada kendaraan yang menjadi objek sewa menyewa maka penyewa sama sekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Untuk perjanjian sewa “dengan sopir” biasanya dilakukan dalam bentuk perjanjian lisan, penyewa biasanya hanya mendapat kuitansi pembayaran harga sewa atau bukti *transport order*. Tetapi juga memungkinkan bahwa perjanjian ini dilakukan dalam bentuk tulisan tergantung pada saat kesepakatan antara pihak-pihak terjadi.

Dengan semakin berkembangnya usaha sewa menyewa *Rent A Car*, maka sering pula terjadi suatu permasalahan terutama antara pihak yang menyewakan kendaraan dengan pihak penyewa terutama dalam hal kepercayaan yang

diberikan oleh pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa, dimana kepercayaan tersebut sering disalahgunakan oleh pihak penyewa dalam menyewa kendaraan *rent a car* sehingga yang menyewakan sering merasa dirugikan oleh pihak penyewa seperti misalnya penyewa tidak memenuhi prestasi sama sekali, penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya atau penyewa memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru padahal kendaraan bermotor dimaksud sudah dipakai untuk beberapa waktu. Dalam hal ini maka penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang menyewakan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penyewa dengan yang menyewakan.<sup>8</sup> Wanprestasi dapat berupa: Pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut

---

<sup>8</sup> Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 98.



perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>9</sup>

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Dalam teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban adalah bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum sesuai dengan jabatan atau kedudukannya.<sup>10</sup>

Tanggung jawab hukum dengan dasar wanprestasi didasari adanya hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual timbul karena perjanjian atau karena undang-undang. Aturan mengenai hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam KUHPdata buku ketiga tentang

perikatan. Van Dunne mengatakan perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>11</sup> Kontrak atau perjanjian adalah “Hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”<sup>12</sup>

Konsekuensi dari perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan yang harus dilaksanakan. Pasal 1550 KUHPdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak yang menyewakan, yaitu :

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian, sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan dalam berlangsungnya sewa.

<sup>9</sup> R. Subekti II, *Op.cit*, h. 45.

<sup>10</sup> Muhammad Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, hal. 61

<sup>11</sup> Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding* PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 9.

Hak yang menyewakan adalah :

1. Uang sewa harus dibayar oleh pihak penyewa tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.
2. Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak penyewa apabila barang yang disewakan rusak.

Pasal 1560 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban pokok pihak penyewa, yaitu:

1. Untuk memakai barang sewaan secara sangat berhati-hati dan menurut tujuan dan maksud dari persetujuan sewa menyewa.
2. Untuk membayar uang sewa pada waktu-waktu yang ditentukan.

Hak dari pihak penyewa :

1. Penyerahan barang yang disewa harus dalam keadaan terpelihara sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksud.
2. Adanya jaminan dari pihak yang menyewakan akan kenikmatan, ketentraman dan tidak adanya cacat dari barang yang disewa.

Menurut Abdulkadir Muhammad wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan mengandung dua kemungkinan alasannya yaitu:

- a. Karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*) jadi diluar kemampuan

penyewa, penyewa tidak bersalah.<sup>13</sup>

Cara yang ditempuh oleh perusahaan rent a car dalam hal terjadinya wanprestasi akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau disebut sebagai pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan rent a car dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan rent a car ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan. Namun apabila seorang penyewa sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi peringatan karena ia telah dinyatakan melakukan wanprestasi. Akibat hukum bagi penyewa yang telah

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.14.

melakukan wanprestasi adalah dikenakan sanksi berikut ini:<sup>14</sup>

1. Membayar kerugian yang diderita oleh perusahaan persewaan atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Kerugian tersebut berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan dan dihitung oleh perusahaan sewa. Ketentuan tentang ganti rugi ini diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan 1252 KUH Perdata.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian. pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Masalah pembatalan perjanjian terdapat pengaturannya pada pasal 1266 KUH Perdata.
3. Pengalihan resiko. Resiko beralih kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perjanjian untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan dimuka hakim.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian, hal ini tercantum dalam pasal 1267 KUHPdata.

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, perusahaan sewa dapat memilih

diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap penyewa yaitu:<sup>15</sup>

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian/ prestasi disertai dengan ganti kerugian
3. Menuntut ganti kerugian saja
4. Menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim
5. Menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah penyewa dikatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam pasal 1243 KUHPdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam pasal 1238 KUHPdata yang pada pokoknya menyatakan :

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 24.

<sup>15</sup> R. Subekti, *Op.cit*, h.53.

## PENUTUP

Dapat dikatakan, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang diluar kemampuan penyewa, penyewa tidak bersalah. Penyewa kendaraan bermotor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh kewajibannya bila dilihat karena kesalahan penyewa, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Pihak yang menyewakan Dapat menuntut pemenuhan perjanjian/ prestasi disertai dengan ganti kerugian, menuntut ganti kerugian saja, menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim dan menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Upaya yang ditempuh oleh perusahaan *rent a car* dalam hal terjadinya wanprestasi akan diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat di kantor pusat perusahaan persewaan atau disebut sebagai pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah. Atau perusahaan *rent a car* dapat memberikan surat peringatan tertulis asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si penyewa. Surat peringatan biasa tidak akan menimbulkan masalah jika penyewa menyadari kewajibannya dan memenuhi kewajibannya tersebut. Cara ini dilakukan karena pada hakekatnya perusahaan *rent a car* ingin selalu menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian sehingga penyewa dapat terus menjadi pelanggan yang bisa memberi keuntungan kepada perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ali Safaat, Muhammad, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Hadikusumo, Hilman 1984, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- HS, Salim, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Noemin S., 1998, *Pengembangan Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Alumni, Bandung.
- Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding* PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti I).
- Subekti, R, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, (selanjutnya disingkat Subekti II).
- Suryodiningrat, 1985, *Azas – Azas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia